

Fraud Lelang Jabatan Serta Pengaruhnya Terhadap Persepsi Masyarakat

Pratomo Cahyo Kurniawan¹, Rifda Isna Mildana², Rohmad Abidin³

^{1,2,3}UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: pratomo.cahyo.k@uingusdur.ac.id¹, rifdaisnamildana@gmail.com²,
rohmad.abidin@uingusdur.ac.id³

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dilihat dari fraud lelang jabatan yang terjadi. Lelang jabatan sudah sering digunakan guna mendapatkan sumber daya yang baik apabila menggunakan metode yang benar. Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh dari hasil membagikan kuesioner kepada masyarakat kabupaten pemalang dengan metode sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud lelang jabatan yang dilakukan kepala daerah berpengaruh terhadap persepsi masyarakat. Kepala daerah yang melakukan fraud secara langsung mendapatkan persepsi yang buruk oleh rakyat yang dia pimpin di daerahnya.

Kata kunci: fraud, jabatan, dan persepsi masyarakat.

ABSTRACT: This study aims to determine how public perception is viewed from the job auction fraud that occurs. Job auctions have often been used to obtain good resources if done correctly. This study uses primary data obtained from distributing questionnaires to the people of Pemalang district using the accidental sampling method. The results of the study indicate that job auction fraud committed by regional heads affects public perception. Regional heads who commit fraud directly receive negative perceptions from the people they lead in their region.

Keywords: fraud, position, and public perception

1. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah di Indonesia secara langsung sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun lamanya. Pemilihan secara langsung ini melibatkan masyarakat pada prosesnya diberikan kesempatan untuk memilih calon yang sudah terdaftar di KPU. Kepala daerah hasil pemilihan langsung yang telah disahkan oleh KPU merupakan pilihan masyarakat 5 tahun ke depan. Kepala daerah terpilih ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menunaikan visi – misi kepemimpinannya selama 5 tahun (Sinaga, 2018).

Era otonomi daerah, kepala daerah diberikan kebebasan seluas luasnya untuk mengembangkan seluruh potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang ada di wilayahnya. Potensi tersebut harus dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk mempermudah jalan kepemimpinannya. Potensi sumber daya manusia menjadi salah satu yang harus dikembangkan, kepala daerah diberikan kesempatan untuk memilih para ASN yang masuk dalam jajaran pemerintahannya (Zainal Abidin, 2020).

Salah satu cara pemilihan yang digunakan dalam seleksi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) adalah dengan melakukan lelang jabatan. Lelang jabatan merupakan salah satu instrumen pengembangan dari UU No. 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sulaji, 2020). Proses lelang jabatan yang benar tentunya akan menguntungkan kepala daerah untuk mendapatkan para birokrat yang berkualitas.

Proses lelang jabatan di lapangan banyak disalah gunakan oleh kepala daerah untuk memuaskan kepentingan kepala daerah. Beberapa kepala daerah justru terlibat kasus – kasus suap jual beli jabatan ASN. Beberapa kepala daerah di Jawa Tengah pun tidak luput dari kasus ini, salah satunya adalah Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo yang diduga melakukan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab usai dilantik menjadi bupati (kpk.go.id, t.t.). Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bupati pemalang menerima uang dari ASN yang ingin menduduki jabatan tinggi dan diduga pula menerima uang dari pihak swasta (national tempo, t.t.).

Fenomena ini tentu saja memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap persepsi masyarakat kabupaten pemalang. Bupati dan wakil bupati terpilih di kabupaten pemalang seharusnya menjadi harapan baru untuk perbaikan pemalang yang lebih baik lagi seperti visi misi yang diusung yaitu “Pemalang AMAN”. Pemalang yang adil makmur agamis dan nganengi. Harapan masyarakat setelah kasus ini terjadi tentunya akan berubah, kemungkinan – kemungkinan hilang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru hingga para pejabat yang ada di lingkungan Pemkab pemalang dapat terjadi, sehingga hal ini menarik untuk diteliti bagaimanakah persepsi masyarakat kabupaten pemalang terhadap fenomena *fraud* lelang jabatan yang telah terjadi.

GONE Teori

Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne Gone Theory menyebutkan faktor yang menyebabkan kecurangan terjadi adalah; (1) *Greedy*, berkaitan dengan perilaku serakah yang ada dalam diri seseorang, (2) *Opportunities*, berkaitan dengan keadaan lingkungan yang membuka kesempatan untuk melakukan fraud, (3) *Need*, berkaitan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh seseorang, dan (4) *Exposure*, berkaitan dengan konsekuensi yang diterima seseorang jika melakukan *fraud* (Restya, 2019).

Lelang Jabatan

Agenda reformasi birokrasi dibidang kepegawaian salah satunya adalah lelang jabatan (Swastika dkk., 2020). Lelang jabatan merupakan seleksi terbuka (*open recruitment*) dalam pengisian jabatan ASN. Lelang jabatan ialah bentuk dari promosi jabatan yang dilakukan secara transparan dan selektif, ditujukan untuk setiap orang yang memiliki syarat administratif untuk mengisi lowongan tersebut (Zainal Abidin, 2020).

Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat sejatinya merupakan hasil pemikiran masyarakat dari berbagai kejadian – kejadian yang terjadi (Kristiyanto, 2017). Persepsi masyarakat ini sangat penting dalam mewujudkan pembangunan sebuah wilayah kabupaten/kota, karena persepsi ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada kepala daerah beserta para pejabat Pemkab. Sitohang (Sitohang dkk., 2018) mengatakan bahwa pemerintahan yang bersih akan memunculkan rasa optimis dikalangan masyarakat, masyarakat secara otomatis mendukung pembangunan – pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini juga diperkuat oleh Didi dan Kusuma (Didi & Kusuma, 2018) yang mengatakan pengelolaan pemerintahan yang bersih akan memunculkan rasa percaya di masyarakat. Namun Restya (Restya, 2019) mengatakan sebaliknya jika perilaku korup yang terjadi di pemerintah akan memunculkan stigma dan persepsi negatif, bahkan dapat memunculkan rasa tidak percaya kepada pemerintah, sehingga hipotesisnya adalah;

H₁: Bagaimana pengaruh *fraud* lelang jabatan terhadap persepsi masyarakat di Pemkab pemalang.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian explanatory dengan metode yang digunakan adalah survei dengan menyebarkan kuesioner (Sugiyono, 2013). Metode

sampling yang digunakan menggunakan accidental sampling yang digunakan dalam menyebar kuesioner. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil penelitian secara nyata di lapangan. Data sekunder di peroleh dari studi pustaka untuk kepentingan data pendukung. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang memiliki KTP Kabupaten Pemalang. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan rumus Lemeshow, karena jumlah populasi tidak diketahui. Sampel yang digunakan yaitu 100 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis menggunakan regresi linear berganda (Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk menguji model regresi, apakah variabel residual terdistribusi normal atau tidak. Model Regresi yang baik mempunyai data berdistribusi normal (Sugiyono, 2013). Data yang berdistribusi normal dapat dilihat dengan uji statistik non - parametrik Kolmogorov Smirnov Test.

Tabel 1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | Unstandardized Residual |
|------------------------|-------------------------|
| Kolmogorov-Smirnov Z | 0,874 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0,430 |

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023

Besarnya nilai Kolmogorof-Smirnov adalah 0,874 dan nilai signifikansi 0,430 dimana tidak signifikan pada 0,05. Hal ini dapat diambil kesimpulan data residual terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 2. Uji Multikolonieritas

| Model | Collinearity Statistics | |
|--------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| <i>Fraud</i> | ,984 | 1,017 |

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023

Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak terdapat variabel independen yang mempunyai nilai Tolerance kurang dari 0,10 hal ini berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama dimana tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Kesimpulannya yaitu tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Glejser

| Variabel | Sig |
|--------------|-------|
| <i>Fraud</i> | 0,464 |

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji t

Tabel 4. Uji t

| Variabel | B | T | Sig |
|--------------|---------------|--------|-------|
| Konstanta | 97,652 | 14,764 | 0,000 |
| <i>Fraud</i> | -0,671 | -3,398 | 0,001 |
| R2 | 0,257 (25,7%) | | |

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel independen moralitas manajemen mempunyai koefisien regresi dengan tanda negatif sebesar 0,671, berarti bahwa pengaruh moralitas manajemen terhadap kecurangan akuntansi adalah negatif. Nilai signifikansi sebesar 0,001 dimana lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) 0,05, dengan demikian Hipotesis (H_1) diterima

Hal ini menunjukkan bahwa kejadian *fraud* yang dilakukan oleh Kepala Daerah benar benar memberikan dampak yang negatif bagi persepsi masyarakat. Persepsi buruk akan muncul akibat *fraud* yang dilakukan yang kemudian dibuktikan di dalam pengadilan. Pejabat yang diangkat pun tidak akan lepas dari *image* nepotisme, akibat adanya politik transaksional. Kejadian yang terjadi di Kabupaten Pemalang benar – benar membuat masyarakat memberikan persepsi yang kurang baik, ditunjang dengan beberapa fakta dilapangan yang begitu terlihat dari infrastruktur yang dapat dikatakan kondisinya rusak.

4. KESIMPULAN

Fraud lelang Jabatan memiliki pengaruh terhadap persepsi masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa *fraud* yang berkaitan dengan lelang jabatan tinggi dapat memberikan persepsi yang buruk di kalangan masyarakat, begitupun sebaliknya jika *fraud* rendah akan berpengaruh pada persepsi yang baik dari masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk dapat meningkatkan persepsi yang baik dalam masyarakat, pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan dan memperbaiki aspek – aspek kinerjanya yang berkaitan dengan otak atik posisi pejabat. Pemerintah harus tetap menggunakan sistem *the right man on the right place*, sehingga mengandung implikasi agar pemerintah daerah dapat mewujudkan *good governance* untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Didi, D., & Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/Jaki.2018.01>
- Kpk.Go.Id. (T.T.). www.kpk.go.id. <https://www.kpk.go.id/Id/Statistik/Penindakan/Tpk-Berdasarkan-Jenis-Perkara>
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 48. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2017.V17.48-56>
- National Tempo. (T.T.). [National.Tempo.Co](http://nationaltempo.co). <https://nasional.tempo.co/read/1622996/lagi-lagi-kepala-daerah-tersandung-kasus-suap-jual-beli-jabatan-apa-alasannya>

- Restya, W. P. D. (2019). Corrupt Behavior In A Psychological Perspective. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.21532/apfjournal.V4i2.113>
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17–25. <https://doi.org/10.37893/jbh.V7i1.10>
- Sitohang, H., Anggusti, M., & Utomo, U. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuaapan Aktif. 2, 14.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (2013 Ed.)*. Alfabeta.
- Sulaji, W. (2020). Peran Lelang Jabatan Dalam Mewujudkan Birokrat Yang Berkualitas. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(2), 145–158. <https://doi.org/10.33369/jsn.6.2.145-158>
- Swastika, D. H., Eko Atmojo, M., & Putri Pratiwi, V. (2020). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Menerapkan Lelang Jabatan Pada Tahun 2018. *Thejournalish: Social And Government*, 2(1), 150–158. <https://doi.org/10.55314/tsg.V2i1.21>
- Zainal Abidin, T. (2020). Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara Di Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.30656/jdkp.V1i2.2323>